

ABSTRAK

Dalam perkembangan suatu usaha buruh memiliki peranan penting. Buruh adalah penggerak suatu bisnis yang tergabung dalam suatu manajemen perusahaan yang artinya tanpa adanya buruh tidak mungkin suatu perusahaan dapat melakukan operasional bisnisnya. Dalam kondisi normal dan perusahaan masih dapat beroperasi dengan baik, hak-hak buruh masih dapat diakomodir oleh manajemen perusahaan. Tetapi ketika perusahaan tersebut mendapatkan masalah keuangan (pailit) seringkali hak-hak buruh tidak bisa diakomodir oleh perusahaan. Salah satu hak buruh diatur dalam UU No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah memperoleh upah. Hak-hak itu pun harus tetap dipenuhi oleh perusahaan meskipun sudah jatuh pailit. Tujuan penelitian disini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum mengenai upah buruh di Pengadilan Negeri Niaga Semarang (Studi Perkara Nomor : 03/Pailit/2012/Pn.Niaga.Smg) dan perlindungan terhadap hak-hak pekerja dalam kepailitan putusan Pengadilan Negeri Niaga Semarang di tinjau dari hukum perdata dan undang-undang kepailitan

Metode Penelitian atau pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan data penelitian yang dibutuhkan.

Hasil penelitian perlindungan hukum terhadap upah buruh dalam perusahaan pailit belum sepenuhnya berpihak kepada kepentingan buruh. undang-undang telah memeberikan perlindungan hukum bagi upah buruh ketika perusahaan dinyatakan pailit, namun kenyataanya belum bias terealisasikan karena adanya pihak-pihak yang mendapatkan hak-hak yang istimewa dan kedudukanya berada diatas para buruh padahal sudah perlindungan mengenai hak-hak buruh sudah diatur didalam Undang-Undang baik itu dalam hukum Perdata dan kepailitan.

Kata Kunci, Perlindungan buruh, Tenaga Kerja/Buruh, Pailit.

ABSTRACT

In the development of a business, labor has an important role. Labor is the driving force of a business that is incorporated in a company management, which means that without workers it is impossible for a company to carry out its business operations. Under normal conditions and the company can still operate properly, the rights of workers can still be accommodated by the company's management. But when the company has financial problems (bankruptcy) often the rights of workers cannot be accommodated by the company. One of the rights of workers is regulated in Law No. 13 of 2003 concerning employment is to earn wages. Even those rights must be fulfilled by the company even though it has fallen into bankruptcy.

The approach method used by the author in this study is normative juridical which examines the laws and regulations and judges' decisions.

The results of the research on legal protection of workers' wages in bankrupt companies have not fully sided with the interests of workers. The law has provided legal protection for workers' wages when the company is declared bankrupt, but in reality it has not been realized because there are parties who get special rights and their position is above the workers even though protection of labor rights has been regulated in the Act. - Act both in civil law and bankruptcy.

Keywords, Labor protection, Labor/Labourer, Bankruptcy.

